

ASDAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

TINGKAT 1

D. Tanggung Jawab Dewan		
D.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	Referensi Panduan
<i>Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang ditetapkan dengan jelas</i>		
D.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV. Pengungkapan dan transparansi IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: 9. Struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk tingkat kepatuhan terhadap peraturan perusahaan nasional kode atau kebijakan tata kelola dan proses penerapannya.
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: 1. Meninjau dan membimbing strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi dan divestasi. 2. Meninjau dan menilai kebijakan dan prosedur manajemen risiko. 3. Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. 4. Memilih, mengawasi, dan memantau kinerja eksekutif utama, dan, jika perlu, mengganti mereka dan mengawasi perencanaan suksesi. 5. Menyelaraskan remunerasi eksekutif utama dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. 6. Memastikan proses pencalonan dan pemilihan dewan yang formal dan transparan. 7. Memantau dan mengelola potensi konflik kepentingan manajemen, anggota dewan dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak terkait. 8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan korporasi untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. 9. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab dewan direksi/komisaris dinyatakan dengan jelas?	
<i>Visi/Misi Perusahaan</i>		
D.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: 1. Meninjau dan membimbing strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi dan divestasi.
D.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setahun sekali?	
Bahasa Inggris D.1.6	Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi penerapan strategi perusahaan?	ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan 1.1 Tanggung Jawab Dewan bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga dan meningkatkan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: 1. Meninjau dan membimbing strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi dan divestasi.

ASDAN CORPORATD GOVDRNANCD SCORDCARD

D.2 Struktur Dewan		Referensi Panduan
KodD Etik atau PDrilaku		
D.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VC Dewan harus menerapkan standar etika yang tinggi. Dewan direksi memiliki peran penting dalam menetapkan standar etika perusahaan, tidak hanya melalui tindakannya sendiri, tetapi juga dalam menunjuk dan mengawasi eksekutif utama dan akibatnya manajemen secara umum. Standar etika yang tinggi merupakan kepentingan jangka panjang perusahaan sebagai sarana untuk membuatnya kredibel dan dapat dipercaya, tidak hanya dalam operasi sehari-hari, tetapi juga berkenaan dengan komitmen jangka panjang. Untuk membuat tujuan dewan direksi jelas dan operasional, banyak perusahaan merasa berguna untuk mengembangkan kode etik perusahaan berdasarkan, antara lain, standar profesional dan terkadang kode perilaku yang lebih luas, dan mengomunikasikannya ke seluruh organisasi. Ini dapat mencakup komitmen oleh perusahaan (termasuk anak perusahaannya) untuk mematuhi Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan standar uji tuntas terkait. Demikian pula, yurisdiksi semakin menuntut agar dewan direksi mengawasi strategi lobi, keuangan, dan perencanaan pajak, sehingga memberikan informasi yang tepat waktu dan tepat sasaran kepada otoritas dan praktik yang tidak dianjurkan, misalnya penerapan skema perencanaan pajak yang agresif, yang tidak berkontribusi pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya, dan dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Kode etik di seluruh perusahaan berfungsi sebagai standar perilaku oleh dewan direksi dan eksekutif utama, yang menetapkan kerangka kerja untuk penerapan penilaian dalam berurusan dengan berbagai konstituen yang sering kali saling bertentangan. Paling tidak, kode etik harus menetapkan batasan yang jelas tentang pengejaran kepentingan pribadi, termasuk transaksi saham perusahaan. Kerangka kerja keseluruhan untuk perilaku etis melampaui kepatuhan terhadap hukum, yang seharusnya selalu menjadi persyaratan mendasar.
D.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode tersebut?	
D.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	
Struktur dan Komposisi DDwan		
D.2.4	Apakah direktur/komisaris independen membentuk setidaknya 50% dari dewan direktur/komisaris?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan.
D.2.5	Apakah perusahaan memiliki batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 periode masing-masing lima tahun untuk direktur/komisaris independen? 1 Jangka waktu lima tahun harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011.	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan.... Meskipun pendekatan nasional untuk mendefinisikan independensi bervariasi, sejumlah kriteria digunakan, seperti tidak adanya hubungan dengan perusahaan, grupnya, dan manajemennya, auditor eksternal perusahaan, dan pemegang saham utama, serta tidak adanya remunerasi, secara langsung atau tidak langsung, dari perusahaan atau grupnya selain biaya jabatan direktur. Dewan direksi juga mungkin diminta untuk membuat temuan afirmatif bahwa seorang direktur independen dari perusahaan karena mereka tidak memiliki hubungan material dengan perusahaan atau bahwa direktur tidak memiliki hubungan yang akan mengganggu pelaksanaan penilaian independen dalam melaksanakan tanggung jawab seorang direktur. Banyak yurisdiksi juga menetapkan masa jabatan maksimum bagi direktur untuk dianggap independen.) ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan Pengangkatan 3.4 KepemilikanDirektur non-eksekutif yang independen harus menjabat selama jangka waktu yang sesuai untuk memastikan mereka memberikan perspektif yang tidak memihak pada diskusi dan pengambilan keputusan dewan. Batasan masa jabatan, jika ada, dan identitas direktur yang telah melampaui batasan tersebut (dan dengan demikian tidak lagi dianggap independen) harus diungkapkan. Masa jabatan direktur harus ditinjau oleh Komite Nominasi setiap tahun dan pemilihan ulang direktur harus dilakukan bergantung pada evaluasi yang memuaskan atas kontribusinya terhadap dewan.
D.2.6	Apakah perusahaan telah menetapkan batasan lima kursi dewan yang dapat dipegang oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif secara bersamaan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan. Anggota Dewan VE3 harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawabnya. Layanan pada terlalu banyak dewan atau komite dapat mengganggu kinerja anggota dewan. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah posisi dewan yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan menikmati legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Pengungkapan tentang keanggotaan dewan dan komite lainnya dan tanggung jawab ketua kepada pemegang saham karenanya merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nominasi dewan dan komite. Mencapai legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran untuk masing-masing anggota dewan (misalnya apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas namadewan dan remunerasi yang terkait.
D.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat pada lebih dari dua dewan direksi perusahaan tercatat di luar grup?	

ASDAN CORPORATD GOVDRNANCD SCORDCARD

KomitD Nominasi

D.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II: Hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama II.C.5 Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan yang penting, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, mengenai remunerasi anggota dewan dan/atau eksekutif utama, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham.... Sehubungan dengan pencalonan kandidat, dewan direksi di banyak perusahaan telah membentuk komite pencalonan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi yang tepat terhadap prosedur pencalonan yang ditetapkan dan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian dewan direksi yang seimbang, beragam, dan berkualitas. Merupakan praktik yang baik bagi anggota dewan independen untuk memiliki peran kunci dalam komite ini. Untuk lebih meningkatkan proses seleksi, Prinsip-prinsip tersebut juga menyerukan pengungkapan pengalaman dan latar belakang kandidat secara lengkap dan tepat waktu untuk dewan dan proses nominasi, yang akan memungkinkan penilaian yang terinformasi tentang kemampuan dan
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen?	
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi seorang direktur/komisaris independen?	
		kesesuaian setiap kandidat. Di beberapa wilayah hukum, pengungkapan informasi tentang posisi dewan atau keanggotaan komite lain yang dipegang oleh kandidat juga diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik, dan di beberapa wilayah hukum juga posisi yang mereka lamar. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan Dewan VE1 harus mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota dewan independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan dan eksekutif utama.
D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan ketentuan acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan. VE2. Dewan direksi harus mempertimbangkan pembentukan komite khusus untuk mendukung seluruh dewan direksi dalam menjalankan fungsinya, khususnya komite audit – atau badan yang setara – untuk mengawasi pengungkapan, pengendalian internal, dan masalah terkait audit. Komite lain, seperti remunerasi, nominasi, atau manajemen risiko, dapat memberikan dukungan kepada dewan direksi tergantung pada ukuran, struktur, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan. Mandat, komposisi, dan prosedur kerja mereka harus ditetapkan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan direksi yang memegang tanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. Jika dibenarkan dalam hal ukuran, struktur, sektor atau tingkat perkembangan perusahaan serta kebutuhan dewan dan profil anggotanya, penggunaan komite dapat meningkatkan kinerja dewan dan memungkinkan fokus yang lebih dalam pada area tertentu. Untuk mengevaluasi manfaat komite dewan, penting bagi pasar untuk menerima gambaran yang lengkap dan jelas tentang mandat, ruang lingkup, prosedur kerja, dan komposisi. Informasi tersebut sangat penting di banyak yurisdiksi di mana dewan direksi diharuskan membentuk komite audit independen dengan kewenangan untuk mengawasi hubungan dengan auditor eksternal.
D.2.12	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali selama setahun?	

ASDAN CORPORATD GOVDRNANCD SCORDCARD

KomitD RDMunDrasi / KomitD KompDnsasi

D.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):V: Tanggung jawab dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif utama dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. Dianggap sebagai praktik yang baik bagi dewan direksi untuk mengembangkan dan mengungkapkan pernyataan kebijakan remunerasi yang mencakup anggota dewan direksi dan eksekutif utama, serta mengungkapkan tingkat remunerasi mereka yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan ini. Pernyataan kebijakan tersebut dapat menentukan, khususnya yang berkaitan dengan eksekutif, hubungan antara remunerasi dan kinerja dengan kriteria ex ante yang terkait dengan kinerja, dan mencakup standar yang dapat diukur yang menekankan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham daripada pertimbangan jangka pendek. Standar yang dapat diukur tersebut antara lain dapat berkaitan dengan total pengembalian pemegang saham dan tujuan serta metrik keberlanjutan yang sesuai. Pernyataan kebijakan umumnya cenderung menetapkan ketentuan pembayaran kepada anggota dewan direksi untuk kegiatan di luar dewan direksi, seperti konsultasi. Pernyataan kebijakan tersebut juga sering menentukan ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota dewan direksi dan eksekutif utama tentang kepemilikan dan perdagangan saham perusahaan, serta prosedur yang harus diikuti dalam pemberian dan penetapan harga ulang opsi. Di beberapa yurisdiksi, pernyataan kebijakan juga memberikan panduan tentang pembayaran yang harus dilakukan saat mempekerjakan dan/atau mengakhiri kontrak seorang eksekutif. Dewan direksi juga dapat memantau pelaksanaan pernyataan kebijakan tentang remunerasi.
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi terdiri seluruhnya dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen?	
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi seorang direktur/komisaris independen?	
		Banyak yurisdiksi merekomendasikan atau mengharuskan agar kebijakan remunerasi dan kontrak untuk anggota dewan dan eksekutif utama ditangani oleh komite khusus dewan yang terdiri dari seluruh atau mayoritas anggota dewan, direktur independen dan mengecualikan eksekutif yang bertugas di komite remunerasi satu sama lain, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pengenalan ketentuan malus dan claw-back dianggap sebagai praktik yang baik. Ketentuan ini memberikan perusahaan hak untuk menahan dan memulihkan kompensasi dari para eksekutif dalam kasus penipuan manajerial dan keadaan lain, misalnya ketika perusahaan diharuskan untuk menyatakan kembali laporan keuangannya pernyataan karena ketidakpatuhan material terhadap persyaratan pelaporan keuangan.
D.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan. VE2. Dewan direksi harus mempertimbangkan pembentukan komite khusus untuk mendukung seluruh dewan direksi dalam menjalankan fungsinya, khususnya komite audit – atau badan yang setara – untuk mengawasi pengungkapan, pengendalian internal, dan masalah terkait audit. Komite lain, seperti remunerasi, nominasi, atau manajemen risiko, dapat memberikan dukungan kepada dewan direksi tergantung pada ukuran, struktur, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan. Mandat, komposisi, dan prosedur kerja mereka harus ditetapkan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan direksi yang memegang tanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. Jika dibenarkan dalam hal ukuran dan struktur perusahaan dan dewan direksinya, serta sektor atau tingkat perkembangan perusahaan, penggunaan komite dapat meningkatkan kinerja dewan direksi. Untuk mengevaluasi manfaat komite dewan direksi, penting bagi pasar untuk menerima gambaran yang lengkap dan jelas tentang tujuan, tugas, dan komposisi mereka. Informasi tersebut sangat penting di banyak yurisdiksi di mana dewan direksi diharuskan membentuk komite audit independen dengan kewenangan untuk mengawasi hubungan dengan auditor eksternal. Komite audit juga harus dapat mengawasi efektivitas dan integritas sistem pengendalian internal.
D.2.17	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi bertemu setidaknya dua kali selama setahun?	

KomitD Audit

D.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):V: Tanggung jawab dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan. Dewan VE1 harus mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota dewan independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan dan eksekutif utama.
--------	--	--

ASDAN CORPORATD GOVDRNANCD SCORDCARD

D.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan.VE1 Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk mengugaskan sejumlah anggota dewan independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit seorang direktur/komisaris independen?	transaksi pihak berelasi, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan dan eksekutif kunci. ICGN (2021) PRINSIP 8: Audit internal dan eksternal 8.3. Komite AuditDewan direksi harus membentuk komite audit yang seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif yang independen. Setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan terkini dan relevan dan semua anggota komite audit harus memiliki pengetahuan keuangan, termasuk pemahaman dasar tentang akuntansi. Komite audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat memengaruhi kinerja perusahaan.laporan keuangan. Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup...
D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit?	
D.2.22	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris independen dari komite memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	ICGN (2021) PRINSIP 8: Audit internal dan eksternal 8.3. Komite AuditDewan direksi harus membentuk komite audit yang seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif independen. Setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan terkini dan relevan dan semua anggota komite audit harus melek finansial, termasuk pemahaman dasar tentang akuntansi. Komite audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup...
D.2.23	Apakah kehadiran Komite Audit dalam rapat diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit bertemu setidaknya empat kali selama setahun?	
D.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal?	ICGN (2021) PRINSIP 8: Audit internal dan eksternal 8.3 Komite AuditDewan direksi harus membentuk komite audit yang seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif yang independen. Setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan terkini dan relevan dan semua anggota komite audit harus melek finansial, termasuk pemahaman dasar tentang akuntansi. Komite audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup:(f) merekomendasikan pengangkatan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Biaya non-audit biasanya harus lebih rendah dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa auditor perlu memberikan layanan ini dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dipastikan;

D.3 Proses Dewan		Referensi Panduan
<i>Rapat dDwan dan kDhadiran</i>		
D.3.1	Apakah rapat dewan direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan?	Penjadwalan rapat dewan direksi sebelum atau di awal tahun akan memungkinkan para direktur untuk merencanakan lebih awal untuk menghadiri rapat tersebut, sehingga membantu memaksimalkan partisipasi, terutama karena direktur non-eksekutif sering kali memiliki komitmen lain. Rapat ad hoc tambahan selalu dapat dijadwalkan jika dan ketika diperlukan. Merupakan praktik umum bagi dewan direksi di pasar maju untuk menjadwalkan rapat dengan cara ini.
D.3.2	Apakah dewan direksi/komisaris bertemu setidaknya enam kali dalam setahun?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan Anggota Dewan VE3 harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawabnya.“... Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran masing-masing anggota dewan (misalnya apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan dan remunerasi terkait.” ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan 1.5 KomitmenDewan harus bertemu secara berkala untuk melaksanakan tugasnya dan para direktur harus menyediakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan menghadiri rapat dewan.
D.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan selama tahun tersebut?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan. Anggota Dewan VE3 harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawabnya.Layanan pada terlalu banyak dewan atau komite dapat mengganggu kinerja anggota dewan. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah posisi dewan yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan menikmati legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Pengungkapan tentang keanggotaan dewan dan komite lainnya dan tanggung jawab ketua kepada pemegang saham karenanya merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nominasi dewan dan komite. Mencapai legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran untuk masing-masing anggota dewan (misalnya apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas namadewan dan remunerasi yang terkait.

ASDAN CORPORATD GOVDRNANCD SCORDCARD

D.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk keputusan dewan?	
D.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan mengadakan rapat terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran satu pun eksekutif?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan. "... Anggota dewan independen dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengambilan keputusan dewan. Mereka dapat memberikan pandangan yang objektif terhadap evaluasi kinerja dewan dan manajemen. Selain itu, mereka dapat memainkan peran penting dalam bidang-bidang yang mungkin memiliki perbedaan kepentingan antara manajemen, perusahaan, dan pemegang sahamnya, seperti remunerasi eksekutif, perencanaan suksesi, perubahan kendali perusahaan, pembelaan terhadap pengambilalihan, akuisisi besar, dan fungsi audit. Agar mereka dapat memainkan peran kunci ini, sebaiknya dewan menyatakan siapa yang mereka anggap independen dan kriteria untuk penilaian ini. Beberapa yurisdiksi juga mengharuskan rapat terpisah dari direktur independen secara berkala." ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan kemandirian2.7. Pertemuan independenKetua harus secara rutin mengadakan rapat dengan direktur non-eksekutif tanpa kehadiran direktur eksekutif. Selain itu, direktur non-eksekutif (yang dipimpin oleh LID) harus bertemu setidaknya setahun sekali, tanpa kehadiran ketua, untuk menilai kinerja ketua atau jika perlu.
<i>Akses terhadap informasi</i>		
D.3.6	Apakah berkas rapat direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VF Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses ke informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Anggota dewan direksi memerlukan informasi yang relevan secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Anggota dewan direksi non-eksekutif biasanya tidak memiliki akses informasi yang sama seperti manajer utama dalam perusahaan. Kontribusi anggota dewan direksi non-eksekutif terhadap perusahaan dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses kepada manajer utama tertentu dalam perusahaan seperti, misalnya, sekretaris perusahaan, auditor internal, dan kepala manajemen risiko atau kepala petugas risiko, dan menggunakan saran eksternal independen dengan biaya perusahaan. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan direksi harus memiliki akses dan memastikan bahwa mereka memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dalam kasus ketika perusahaan yang diperdagangkan secara publik merupakan bagian dari suatu grup, Kerangka regulasi juga harus memastikan akses anggota dewan terhadap informasi penting tentang aktivitas anak perusahaannya untuk mengelola risiko di seluruh grup dan menerapkan tujuan di seluruh grup. Pada saat yang sama, kerangka regulasi harus menjaga perlindungan untuk memastikan bahwa orang dalam tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka atau orang lain. Jika perusahaan mengandalkan model manajemen risiko yang kompleks, anggota dewan harus diberi tahu tentang kemungkinan kekurangan model tersebut.
D.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VF Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses ke informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Anggota dewan direksi memerlukan informasi yang relevan secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Anggota dewan direksi non-eksekutif biasanya tidak memiliki akses informasi yang sama seperti manajer utama dalam perusahaan. Kontribusi anggota dewan direksi non-eksekutif terhadap perusahaan dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses kepada manajer utama tertentu dalam perusahaan seperti, misalnya, sekretaris perusahaan, auditor internal, dan kepala manajemen risiko atau kepala petugas risiko, dan menggunakan saran eksternal independen dengan biaya perusahaan. ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan 1.8. SaranDewan direksi harus memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efisien dan efektif berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan. Dewan direksi harus memiliki akses terhadap nasihat dari sekretaris perusahaan (atau penasihat umum) dan/atau nasihat independen sebagaimana mestinya atas biaya perusahaan.
D.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan?	

ASDAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Direksi

D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II. Hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama II.C.5 Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan yang penting, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, mengenai remunerasi anggota dewan dan/atau eksekutif utama, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. Pemilihan anggota dewan direksi merupakan hak dasar pemegang saham. Agar proses pemilihan berjalan efektif, pemegang saham harus dapat berpartisipasi dalam pencalonan anggota dewan direksi dan memberikan suara untuk masing-masing calon atau daftar yang berbeda. Untuk tujuan ini, pemegang saham memiliki akses di sejumlah negara terhadap materi pemungutan suara perusahaan yang disediakan bagi pemegang saham, dengan ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan. Terkait pencalonan kandidat, dewan direksi di banyak perusahaan telah membentuk komite pencalonan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi yang tepat terhadap prosedur pencalonan yang ditetapkan dan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian dewan direksi yang seimbang, beragam, dan berkualitas. Merupakan praktik yang baik bagi anggota dewan direksi independen untuk memiliki peran kunci dalam komite ini. Untuk lebih meningkatkan proses seleksi, Prinsip-prinsip tersebut juga menyerukan pengungkapan penuh dan tepat waktu atas pengalaman dan latar belakang kandidat untuk dewan direksi dan proses pencalonan, yang akan memungkinkan penilaian yang tepat atas kemampuan dan kesesuaian setiap kandidat. Di beberapa yurisdiksi, diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik untuk juga mengungkapkan informasi tentang posisi dewan direksi lain yang dipegang oleh calon, dan di beberapa yurisdiksi juga posisi yang mereka lamar. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD6 Memastikan proses pencalonan dan pemilihan dewan yang formal dan transparan. Prinsip-prinsip tersebut mendorong peran aktif pemegang saham dalam pencalonan dan pemilihan anggota dewan. Dewan, dengan dukungan komite pencalonan jika dibentuk, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses pencalonan dan pemilihan dipatuhi. Pertama, meskipun prosedur aktual untuk pencalonan mungkin berbeda di antara negara-negara, dewan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan transparan dan dipatuhi. Kedua, dewan memiliki peran utama dalam menentukan profil umum atau individu anggota dewan yang mungkin dibutuhkan perusahaan pada waktu tertentu, dengan mempertimbangkan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai untuk melengkapi keterampilan dewan yang ada. Ketiga, dewan atau komite pencalonan memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial untuk memenuhi profil yang diinginkan dan mengusulkannya kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham. Keterlibatan dan dialog dewan dengan pemegang saham dianggap sebagai praktik yang baik dalam proses ini, asalkan dewan memastikan transparansi, perlakuan yang sama, dan bahwa informasi sensitif internal dan bisnis tidak diungkapkan. Dianggap sebagai praktik yang baik untuk melakukan proses pencarian terbuka yang mencakup berbagai latar belakang menanggapi tujuan keberagaman dan sifat risiko yang terus berkembang.
D.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam pengangkatan direktur/komisaris baru?	
D.3.11	Apakah semua direktur/komisaris tunduk pada pemilihan ulang setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan tercatat di negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan 5 tahun? 2 masing-masing? 2 Jangka waktu lima tahun harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011.	ICGS (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan Pengangkatan 3.7 Proses pemilihan direktur Para direktur hendaknya dipilih menjadi anggota dewan, sebaiknya setiap tahun, atau dipilih kembali setiap tiga tahun sekali, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui persetujuan mayoritas saham yang memberikan suara mendukung pada setiap resolusi.

Masalah Remunerasi

D.3.12	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD5. Menyelaraskan remunerasi eksekutif dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. ICGN (2021) PRINSIP 5: Remunerasi Remunerasi harus dirancang untuk menyelaraskan kepentingan CEO, eksekutif, dan karyawan secara adil dan efektif. pejabat dan tenaga kerja dengan strategi dan tujuan perusahaan untuk membantu memastikan pelestarian dan penciptaan nilai berkelanjutan jangka panjang. Remunerasi agregat harus diimbangi dengan tepat dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham dan retensi modal untuk investasi masa depan dan tingkat kuantum harus dapat dipertahankan relatif terhadap pertimbangan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan.
--------	--	--

ASDAN CORPORATD GOVDRNANCD SCORDCARD

D.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan penarikan kembali dan bonus yang ditangguhkan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif utama dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. Banyak yurisdiksi merekomendasikan atau mengharuskan agar kebijakan remunerasi dan kontrak untuk anggota dewan dan eksekutif utama ditangani oleh komite khusus dewan yang terdiri dari seluruh atau mayoritas anggota dewan, direktur independen dan mengecualikan eksekutif yang bertugas di komite remunerasi satu sama lain, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pengenalan ketentuan malus dan claw-back dianggap sebagai praktik yang baik. Ketentuan tersebut memberikan perusahaan hak untuk menahan dan mendapatkan kompensasi dari para eksekutif dalam kasus penipuan manajerial dan keadaan lainnya, misalnya ketika perusahaan diharuskan untuk menyatakan kembali laporan keuangannya karena ketidakpatuhan material terhadap persyaratan pelaporan keuangan. ICGN (2021) PRINSIP 5: Remunerasi 5.4 Malus dan clawback Perusahaan harus memasukkan ketentuan dalam rencana insentif mereka yang memungkinkan perusahaan untuk menahan pembayaran sejumlah uang ('malus'), atau memperoleh kembali sejumlah uang yang dibayarkan ('clawback'), jika terjadi pelanggaran serius atau kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan perusahaan.
<i>Audit Internal</i>		
D.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. Dewan direksi harus menunjukkan peran kepemimpinan untuk memastikan bahwa sarana pengawasan risiko yang efektif telah tersedia. Memastikan integritas sistem pelaporan dan pemantauan yang penting akan mengharuskan dewan direksi menetapkan dan menegakkan garis tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas di seluruh organisasi. Dewan direksi juga perlu memastikan bahwa ada pengawasan yang tepat oleh manajemen senior. Biasanya, hal ini mencakup pembentukan fungsi audit internal. Fungsi ini dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan berkelanjutan kepada komite audit dewan atau badan setara dalam pengawasan komprehensifnya terhadap kontrol internal dan operasi perusahaan. Peran dan fungsi audit internal bervariasi di berbagai yurisdiksi, tetapi dapat mencakup penilaian dan evaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses kontrol internal.
D.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama firma eksternal diungkapkan?	Perusahaan sering kali mengungkapkan bahwa mereka memiliki audit internal, tetapi dalam praktiknya, audit internal lebih banyak bersifat formal daripada substansi. Misalnya, audit internal dapat ditugaskan kepada seseorang dengan tanggung jawab operasional lainnya. Karena audit internal tidak diatur, tidak seperti audit eksternal, ada perusahaan yang menyediakan layanan audit internal yang dialihdayakan yang tidak memiliki kualifikasi yang tepat untuk melakukannya. Memublikasikan identitas kepala audit internal atau penyedia layanan eksternal akan memberikan sejumlah perlindungan bahwa audit internal bersifat substantif.
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk:VD8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. Dianggap sebagai praktik yang baik bagi auditor internal untuk melapor kepada komite audit independen dari dewan atau badan setara yang juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan auditor eksternal, sehingga memungkinkan tanggapan terkoordinasi oleh dewan.
<i>Pengawasan Risiko</i>		
D.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD2. Meninjau dan menilai kebijakan dan prosedur manajemen risiko. VD8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. ICGN (2021) PRINSIP 6: Pengawasan risiko Dewan direksi harus secara proaktif mengawasi penilaian dan pengungkapan risiko utama perusahaan dan menyetujui pendekatan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkala terhadap setiap perubahan bisnis yang signifikan serta memastikan bahwa pendekatan tersebut berfungsi secara efektif.
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa dewan direksi/komisaris telah melakukan tinjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?	ICGN (2021) PRINSIP 6: Pengawasan risiko Dewan direksi harus secara proaktif mengawasi penilaian dan pengungkapan risiko utama perusahaan dan menyetujui pendekatan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkala terhadap setiap perubahan bisnis yang signifikan serta memastikan bahwa pendekatan tersebut berfungsi secara efektif.

ASDAN CORPORATD GOVDRNANCD SCORDCARD

D.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang secara material dihadapi perusahaan (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV: Pengungkapan dan Transparansi IV. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.8 Faktor risiko yang dapat diperkirakan Pengguna informasi keuangan dan pelaku pasar memerlukan informasi tentang risiko material yang dapat diduga secara wajar, yang mungkin mencakup: risiko yang khusus terhadap industri atau wilayah geografis tempat perusahaan beroperasi; ketergantungan pada komoditas dan rantai nilai; risiko pasar keuangan termasuk risiko suku bunga atau mata uang; risiko yang terkait dengan derivatif dan transaksi di luar neraca; risiko perilaku bisnis; risiko keamanan digital; dan risiko keberlanjutan, terutama risiko yang terkait dengan iklim.Prinsip-prinsip tersebut membayangkan pengungkapan informasi yang memadai dan menyeluruh untuk sepenuhnya memberi tahu investor dan pengguna lain tentang risiko material dan yang dapat diperkirakan dari perusahaan. Pengungkapan risiko paling efektif bila disesuaikan dengan perusahaan dan industri tertentu yang bersangkutan. Pengungkapan tentang sistem untuk memantau dan mengelola risiko semakin dianggap sebagai praktik yang baik, termasuk sifat dan efektivitas proses uji tuntas terkait.
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan dari dewan direksi/komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perusahaan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD8 Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan.Auditor internal dianggap sebagai praktik yang baik untuk melapor kepada komite audit independen dari dewan direksi atau badan setara yang juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan auditor eksternal, sehingga memungkinkan tanggapan terkoordinasi oleh dewan direksi. Fungsi audit internal dan eksternal harus diartikulasikan dengan jelas sehingga dewan direksi dapat memaksimalkan kualitas jaminan yang diterimanya. Komite audit, atau badan setara, juga harus dianggap sebagai praktik yang baik untuk meninjau dan melaporkan kepada dewan direksi kebijakan paling kritis yang menjadi dasar laporan keuangan dan laporan perusahaan lainnya. Namun, dewan direksi harus tetap memegang tanggung jawab akhir untuk mengawasi sistem manajemen risiko perusahaan dan untuk memastikan integritas sistem pelaporan. Beberapa yurisdiksi telah menetapkan ketentuan bagi ketua dewan direksi untuk melaporkan proses pengendalian internal.

D.4	Orang-orang di Dewan	Referensi Panduan
<i>KDtua DDwan</i>		
D.4.1	Apakah orang yang berbeda memegang peran sebagai ketua dan CEO?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan.Di wilayah hukum dengan sistem dewan direksi tingkat tunggal, objektivitas dewan direksi dan independensinya dari manajemen dapat diperkuat dengan pemisahan peran kepala eksekutif dan ketua dewan direksi. Pemisahan kedua jabatan tersebut secara umum dianggap sebagai praktik yang baik, karena dapat membantu mencapai keseimbangan kekuasaan yang tepat, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kapasitas dewan direksi untuk membuat keputusan yang independen dari manajemen. Penunjukan direktur utama yang independen dari manajemen juga dianggap sebagai alternatif praktik yang baik di beberapa wilayah hukum jika peran tersebut ditetapkan dengan kewenangan yang cukup untuk memimpin dewan direksi dalam kasus-kasus di mana manajemen memiliki konflik yang jelas. Mekanisme semacam itu juga dapat membantu memastikan tata kelola perusahaan yang berkualitas tinggi dan fungsi dewan direksi yang efektif. Ketua atau direktur independen utama dapat, di beberapa wilayah hukum, didukung oleh sekretaris perusahaan. ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan kemandirian 2.1 Kepemimpinan yang mandiriHarus ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara peran ketua dewan dan CEO untuk menghindari kewenangan pengambilan keputusan yang tidak terbatas pada satu individu. Hal ini khususnya relevan dalam perusahaan yang dikendalikan ketika ketua atau CEO merupakan pemegang saham yang signifikan. Dewan harus diketuai oleh seorang direktur independen yang harus independen pada tanggal pengangkatan. Jika peran ketua dan CEO digabungkan, dewan harus menjelaskan alasan mengapa hal ini merupakan kepentingan terbaik perusahaan dalam laporan tahunan dan terus meninjau strukturnya. Tanggung jawab ketua, CEO, direktur independen utama, dan ketua komite harus dijelaskan dengan jelas dan diungkapkan kepada publik.
D.4.2	Apakah ketua merupakan direktur/komisaris independen?	
D.4.3	Apakah ada direktur yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan kemandirian 2.5 Suksesi CEO ke KetuaPraktik CEO perusahaan yang pensiun tetap menjadi direktur di dewan direksi harus dicegah, terlepas dari masa tenang, atau jika praktik ini benar-benar terjadi, CEO yang pensiun tidak boleh bertugas di komite dewan yang mengharuskan perwakilan independen. Jika, sebagai pengecualian, dewan memutuskan bahwa CEO yang pensiun harus menggantikannya sebagai ketua, dewan harus berkonsultasi dengan pemegang saham terlebih dahulu dengan menetapkan alasan yang meyakinkan dan memberikan penjelasan terperinci dalam laporan tahunan. Kecuali jika ada keadaan luar biasa, harus ada jeda dalam masa jabatan di antara peran (misalnya, periode dua tahun)

ASDAN CORPORATD GOVDRNANCD SCORDCARD

Bahasa IndonDsia: D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan?	ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan kemandirian 2.3 Peran Ketua Ketua harus memimpin dewan dan memastikan efektivitasnya sambil menginspirasi komitmen bersama di antara para anggotanya. direktur terhadap tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan. Ini termasuk mendorong budaya keterbukaan untuk memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan dan waktu yang cukup untuk membahas semua item agenda. Ketua harus menetapkan agenda rapat, memastikan bahwa anggota dewan memiliki informasi yang cukup dan tepat waktu untuk menantang dan mendiskusikan usulan manajerial secara konstruktif.
<i>DirDktur IndDpDndDn Utama</i>		
D.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk Direktur Utama/Senior Independen dan apakah perannya telah ditetapkan?	ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan kemandirian 2.4 Pimpinan direktur independen Dewan Direksi harus menunjuk seorang Direktur Independen Utama (LID) bahkan ketika ketua dewan direksi tersebut independen. LID menyediakan saluran komunikasi yang berharga bagi pemegang saham, pemangku kepentingan terkait, dan direktur untuk membahas hal-hal yang mungkin melibatkan konflik kepentingan bagi ketua dewan direksi yang mungkin mencakup pemegang saham penting jika ada hubungan di antara mereka. LID tidak boleh memiliki masa jabatan direktur di perusahaan yang menimbulkan pertanyaan mengenai independensi LID sebagaimana ditetapkan dalam Panduan 2.6.h. Dalam dewan direksi dua tingkat, peran LID dapat diambil alih oleh wakil ketua.
<i>KDtDrampilan dan KompDtDnsi</i>		
D.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama tempat perusahaan beroperasi?	ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan Pengangkatan Dewan Direksi harus terdiri dari cukup banyak direktur yang memiliki pengetahuan, independensi, kompetensi, pengalaman industri yang relevan, dan keberagaman perspektif untuk menghasilkan tantangan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang efektif dan objektif, sesuai dengan tujuan perusahaan, strategi jangka panjang, dan pemangku kepentingan yang relevan.

D.5	Kinerja Dewan	Referensi Panduan
-----	---------------	-------------------

PDngDmbangan DirDktur

D.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru?	ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan 1.5 Komitmen Dewan direksi harus mengadakan rapat secara berkala untuk melaksanakan tugasnya dan para direktur harus menyediakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan menghadiri rapat dewan direksi. Harus ada induksi formal bagi semua direktur dewan direksi baru untuk memastikan mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang tujuan, model bisnis, dan strategi perusahaan sesegera mungkin setelah pengangkatan mereka.
D.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan praktik serta program nyata yang mendorong direktur/komisaris untuk menghadiri program pendidikan profesional yang berkelanjutan atau berkesinambungan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan. Dewan VE4 harus secara berkala melakukan evaluasi untuk menilai kinerja mereka dan menilai apakah mereka memiliki perpaduan yang tepat antara latar belakang dan kompetensi, termasuk dalam hal gender dan bentuk keberagaman lainnya. Untuk meningkatkan praktik dewan direksi dan kinerja anggotanya, semakin banyak yurisdiksi kini mendorong perusahaan untuk terlibat dalam evaluasi dan pelatihan dewan direksi dan komite. Banyak kode tata kelola perusahaan merekomendasikan evaluasi tahunan terhadap dewan direksi, yang dapat didukung secara berkala oleh fasilitator eksternal untuk meningkatkan objektivitas. Kecuali jika kualifikasi tertentu diperlukan, seperti untuk lembaga keuangan, hal ini mungkin mencakup bahwa anggota dewan direksi memperoleh keterampilan yang sesuai saat diangkat. Selanjutnya, anggota dewan harus selalu mengikuti perkembangan hukum, peraturan, dan perubahan baru yang relevan. risiko komersial dan risiko lainnya.

PDngangkatan dan KinDrja CDO/ManajDmDn DksDktif

D.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Pelaksana/Presiden dan manajemen kunci?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD4 Memilih, mengawasi, dan memantau kinerja eksekutif utama, dan, jika perlu, mengganti mereka dan mengawasi perencanaan suksesi.
D.5.4	Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Pelaksana/Presiden?	VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Pemantauan tata kelola oleh dewan mencakup tinjauan berkelanjutan atas struktur internal perusahaan untuk memastikan adanya garis akuntabilitas yang jelas bagi manajemen di seluruh organisasi. Pemantauan tersebut juga harus mencakup apakah kerangka tata kelola perusahaan tetap sesuai dengan perubahan material pada ukuran, kompleksitas, strategi bisnis, pasar, dan persyaratan peraturan perusahaan. Selain mensyaratkan pemantauan dan pengungkapan praktik tata kelola perusahaan secara berkala, setidaknya dalam bentuk ringkasan, banyak yurisdiksi telah bergerak untuk merekomendasikan, atau bahkan mengamatkan, penilaian oleh dewan atas kinerja mereka dan kinerja komite mereka, masing-masing anggota dewan, ketuadan CEO.

PDnilaian DDwan

ASDAN CORPORATD GOVDRNANCD SCORDCARD

D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap dewan direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan Pengangkatan 3.3 Evaluasi Evaluasi dewan direksi harus dilakukan setiap tahun untuk meninjau komposisi yang selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan, perencanaan suksesi, dan kebijakan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dewan direksi harus melakukan tinjauan ketat terhadap kinerjanya (sebagai badan kolektif), sekretaris perusahaan (jika posisi tersebut ada), komite dewan dan direktur individu sebelum diusulkan untuk dipilih. Dewan harus secara berkala (sebaiknya setiap tiga tahun) melibatkan konsultan eksternal independen untuk melakukan evaluasi eksternal. Pemimpin IndependenDirektur dan Komite Nominasi harus bertanggung jawab atas evaluasi kinerja ketua. Dewan harus mengungkapkan proses evaluasi dan, sejauh mungkin, setiap masalah material yang relevan yang timbul dari kesimpulan dan/atau tindakan yang diambil sebagai konsekuensinya.
-------	--	--

PDilaian DirDktur

D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan Pengangkatan 3.3 Evaluasi Evaluasi dewan direksi harus dilakukan setiap tahun untuk meninjau komposisi yang selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan, perencanaan suksesi, dan kebijakan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dewan direksi harus melakukan tinjauan ketat terhadap kinerjanya (sebagai badan kolektif), sekretaris perusahaan (jika posisi tersebut ada), komite dewan dan direktur individu sebelum diusulkan untuk dipilih. Dewan harus secara berkala (sebaiknya setiap tiga tahun) melibatkan konsultan eksternal independen untuk melakukan evaluasi eksternal. Pemimpin IndependenDirektur dan Komite Nominasi harus bertanggung jawab atas evaluasi kinerja ketua. Dewan harus mengungkapkan proses evaluasi dan, sejauh mungkin, setiap masalah material yang relevan yang timbul dari kesimpulan dan/atau tindakan yang diambil sebagai konsekuensinya.
-------	--	--

PDilaian KomitD

D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. ICGN (2021) PRINSIP 3:Komposisi dan Pengangkatan 3.3 Evaluasi Evaluasi dewan direksi harus dilakukan setiap tahun untuk meninjau komposisi yang selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan, perencanaan suksesi, dan kebijakan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dewan direksi harus melakukan tinjauan ketat terhadap kinerjanya (sebagai badan kolektif), sekretaris perusahaan (jika posisi tersebut ada), komite dewan dan direktur individu sebelum diusulkan untuk dipilih. Dewan harus secara berkala (sebaiknya setiap tiga tahun) melibatkan konsultan eksternal independen untuk melakukan evaluasi eksternal. Pemimpin IndependenDirektur dan Komite Nominasi harus bertanggung jawab atas evaluasi kinerja ketua. Dewan harus mengungkapkan proses evaluasi dan, sejauh mungkin, setiap masalah material yang relevan yang timbul dari kesimpulan dan/atau tindakan yang diambil sebagai konsekuensinya.
-------	---	---